

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah kolonial Belanda mendukung pembangunan infrastruktur yang memodernisasi wilayah-wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk kota Bogor sejak awal abad ke-19. Perhatian VOC terhadap wilayah Bogor baru terlihat dengan rencana pembangunan untuk tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal setelah terjadinya kerusuhan Cina tahun 1740 di Batavia. Kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti "kota tanpa kesibukan" pada tahun 1745. Sembilan kampung digabungkan menjadi satu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Demang di daerah yang dinamakan Regentschap Kampung Baru, yang kemudian berubah menjadi Regentschap Buitenzorg. Kemudian kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan melalui *Decentralisatie Wet* pada tahun 1903, memberikan otonomi kepada pemerintah kota (*gemeente*) untuk mengelola pembangunan wilayahnya, termasuk dalam perencanaan dan pengembangan ruang publik. Hal ini menyebabkan Hindia Belanda mengalami masa kejayaan dalam pembangunan infrastruktur.¹

Ruang publik di kota Bogor sering kali memiliki fungsi sosial dan politik yang signifikan. Ini menandakan bahwa kota Bogor memainkan peran penting dalam memajukan pengetahuan ilmiah di berbagai bidang. Sebagai contoh Kebun Raya Buitenzorg yang didirikan pada tahun 1817, menjadi salah satu pusat penelitian dan konservasi tanaman tropis terkemuka di dunia. Kebun raya ini memainkan peran penting dalam pengenalan tanaman karet, kina, dan teh ke Indonesia, yang menjadi tanaman penting bagi ekonomi negara ini. Sejak saat itu, Bogor dikenal sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian Pertanian. Selanjutnya, Istana Buitenzorg diresmikan sebagai kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh kolonial memainkan

¹ Krisnanda Theo Primaditya. (2021). Modernisasi Kota: Saluran Air Bersih Perpipaan di Jawa Masa Kolonial. *Lembaran Sejarah*, 17(2), 178 .

peran penting dalam pembangunan masyarakat dan tata kota Bogor.

Pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan Bogor sebagai pusat penelitian ilmiah, pertanian, dan administrasi. Salah satu contoh signifikan adalah pembangunan Kebun Raya Bogor pada tahun 1817, yang menjadi pusat penelitian botani tropis terbesar di Asia Tenggara.² Selain itu, pembangunan Stasiun Kereta Api Bogor pada tahun 1881 memperlihatkan pentingnya infrastruktur ini dalam mendukung transportasi komoditas pertanian. Bangunan-bangunan lain, seperti Bilbiliotheca Bogoriensis (Perpustakaan Pusat), Societiet (Balai kota bogor), Kedung Karesidenan, Wilhemina Park, Van Imhoff Plein juga berperan sebagai ruang publik untuk aktivitas sosial dan administrasi.

Kebijakan tata ruang kolonial di Hindia Belanda cenderung membagi kota berdasarkan ras dan kelas sosial. Kota Bogor tidak terlepas dari pola segregasi ini, di mana pemukiman dan ruang publik dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan kaum Eropa sementara masyarakat pribumi ditempatkan di wilayah pinggiran kota. Hal ini mirip dengan tata ruang yang diterapkan di Batavia (Jakarta), Semarang, dan Surabaya. Konsep *garden city* yang diterapkan di Bogor, yang menekankan keseimbangan antara lingkungan alami dan infrastruktur perkotaan, juga menjadi bagian dari perencanaan kolonial yang lebih luas.

Ruang publik adalah area atau bangunan yang dimiliki atau diatur oleh otoritas publik dan dapat diakses serta digunakan oleh semua orang tanpa diskriminasi. Ruang publik berfungsi sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan melakukan aktivitas bersama yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan rekreasi. Jürgen Habermas berpedapat bahwa ruang publik adalah sebuah arena diskursif yang berarti individu dan kelompok dapat berdiskusi secara rasional mengenai isu-isu kepentingan Bersama.³ Dalam hal ini, ruang publik di Bogor, seperti Kebun Raya Bogor memiliki peran tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan politik. Pengembangan ruang publik

² Tohjiwa, A. D., Soetomo, S., Sjahbana, J. A., & Purwanto, E. (2010). Kota Bogor dalam tarik menarik kekuatan lokal dan regional. In *Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP) 1*. Universitas Gadjah Mada.

³ Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*, hlm 27

ini sesuai dengan tujuan pemerintah kolonial untuk memodernisasi wilayah jajahannya sekaligus mengkonsolidasi kekuasaan mereka.

Thomas Karsten adalah seorang arsitek yang berperan penting dalam perencanaan kota di Indonesia, menyatakan bahwa ruang publik harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi lokal. Karsten berpendapat bahwa pembangunan kota kolonial tidak boleh mengabaikan karakteristik masyarakat setempat, sehingga desain arsitektur dan perencanaan kota harus memperhitungkan elemen lokal.⁴ Pemikiran Karsten ini tercermin dalam berbagai ruang publik di Bogor yang mencerminkan perpaduan antara gaya arsitektur Eropa dan adaptasi terhadap iklim tropis Indonesia. Tujuan dari pembangunan ruang publik di Bogor, yaitu untuk memfasilitasi eksploitasi Sumber Daya Alam dan mempermudah urusan administrasi pemerintah kolonial. Pada saat itu, Bogor sudah dikenal sebagai pusat Pendidikan dan Penelitian Pertanian Nasional.

Ruang publik dirancang sebagai bagian dari proyek modernitas kolonial yang berorientasi pada efisiensi, estetika Eropa, dan kontrol sosial pada masa kolonial Belanda. Ruang publik seperti taman kota (*stadspark*), alun-alun, stasiun kereta, pasar, dan gedung pemerintahan dibangun dengan prinsip segregatif: membedakan antara ruang bagi penduduk Eropa dan non-Eropa. Ruang publik bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi alat visual kekuasaan kolonial. Pasca kemerdekaan, terutama dalam periode awal pemerintahan Indonesia, ruang publik mulai dimaknai ulang sebagai simbol kedaulatan nasional dan inklusivitas. Ruang-ruang yang sebelumnya eksklusif bagi golongan kolonial mulai diakses oleh warga negara Indonesia, dan digunakan untuk berbagai aktivitas kolektif seperti rapat umum, demonstrasi, dan kegiatan kebudayaan yang mencerminkan semangat kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kebun Raya Bogor tetap dipertahankan sebagai pusat penelitian dan konservasi tanaman tropis. Pengelolaannya beralih dari tangan pemerintah kolonial ke lembaga-lembaga ilmiah nasional, seperti Lembaga

⁴ Widdy Nuril Ahyar, Peran Thomas Karsten dalam Pengembangan Permukiman Eropa di Buitenzorg 1903-1942, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023), hlm. 30.

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kebun Raya tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian, tetapi juga menjadi destinasi wisata dan sarana edukasi bagi masyarakat luas. Beberapa bangunan publik di Bogor mengalami perubahan nama dan kepemilikan setelah kemerdekaan. Misalnya, Istana Buitenzorg berubah nama menjadi Istana Bogor dan menjadi salah satu kediaman resmi Presiden Indonesia. Gedung-gedung pemerintahan yang sebelumnya digunakan oleh administrasi kolonial kini dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan Indonesia. Perubahan ini mencerminkan pergeseran kekuasaan dari kolonial ke nasional serta upaya untuk menghilangkan simbol-simbol penjajahan dari ruang-ruang publik.

Masyarakat lokal mulai lebih aktif dalam mengklaim ruang-ruang publik yang sebelumnya didominasi oleh elit kolonial pasca kemerdekaan Indonesia. Tempat-tempat seperti alun-alun, taman kota, dan ruang publik pada masa kolonial kini menjadi ruang terbuka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang-ruang ini mulai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk festival rakyat, pasar malam, serta acara keagamaan dan nasional. Pada masa kolonial, beberapa ruang publik di Bogor pernah digunakan sebagai tempat protes, diskusi, dan pertemuan politik, terutama pada awal abad ke-20 ketika gerakan nasionalisme mulai berkembang. Misalnya, *Societeit* atau balai kota yang sebelumnya menjadi tempat pertemuan kaum elit Eropa, kemudian mulai digunakan untuk pertemuan dan diskusi oleh kelompok pergerakan nasional.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi akses masyarakat pribumi terhadap ruang publik tertentu. Bangunan seperti *Societeit* dan klub-klub eksklusif hanya diperuntukkan bagi kalangan Eropa dan elite pribumi yang mendapat izin khusus. Kebijakan ini mempertegas segregasi sosial yang terjadi pada masa kolonial. Bahkan di Kebun Raya Bogor, meskipun memiliki akses lebih luas dibandingkan dengan tempat lain, terdapat aturan yang mengatur siapa saja yang boleh berkunjung dan beraktivitas di dalamnya. Jika dibandingkan dengan ruang publik modern di Bogor, fungsinya masih tetap relevan meskipun mengalami beberapa perubahan. Kebun Raya Bogor, alun-alun, dan taman kota tetap menjadi tempat interaksi sosial, namun kini juga berfungsi sebagai destinasi wisata dan pusat edukasi. Sementara itu, beberapa bangunan publik yang

dulunya bersifat administratif kini telah dialihfungsikan untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti museum dan pusat kebudayaan.

Pemerintah kolonial membentuk dan meregulasi ruang publik sebagai instrumen dominasi simbolik dan pengawasan. Ruang-ruang seperti alun-alun, stasiun, dan pasar berada di bawah kendali ketat, baik dari segi arsitektur maupun fungsi sosial. Penataan ruang mengikuti prinsip *zoning*, yang memisahkan area Eropa, Tionghoa, dan Pribumi, sehingga ruang publik tidak netral, melainkan mencerminkan struktur hierarki rasial kolonial. Melalui ruang publik yang terdesain rapi dan monumental, pemerintah kolonial menanamkan nilai-nilai kekuasaan, keteraturan, dan peradaban ala Barat. Kontrol ini diperkuat dengan regulasi kehadiran, larangan berkumpul bagi golongan tertentu, serta pengawasan aparat kolonial terhadap aktivitas warga non-Eropa.

Ruang publik yang didirikan pada masa kolonial masih berdiri hingga hari ini dan menjadi bagian penting dari budaya kota Bogor. Arsitektur kolonial ini tidak hanya menjadi daya Tarik wisata, tetapi menjadi bukti sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Bangunan publik yang didirikan oleh pemerintah kolonial, seperti Gedung pemerintahan menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah Kolonial untuk memodernisasi wilayah tersebut. tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas administratif dan ekonomi, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ruang publik pada masa kolonial Belanda tidak dapat dipahami sebagai ruang yang netral dan terbuka bagi semua golongan. Sebaliknya, ruang-ruang seperti taman kota, stasiun, pasar, dan gedung pemerintahan dirancang dalam kerangka kekuasaan yang bersifat hierarkis dan eksklusif. Akses terhadap ruang publik ditentukan oleh klasifikasi sosial berdasarkan ras dan status hukum, yang membatasi kehadiran masyarakat Pribumi dan non-Eropa dalam ruang-ruang strategis kota. Kondisi ini mencerminkan bagaimana pemerintah kolonial memanfaatkan ruang publik tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dan simbol dominasi kekuasaan. Meskipun pascakemerdekaan sekat-sekat ini mulai terkikis, hingga awal abad ke-20

masyarakat Pribumi di kota-kota seperti Bogor masih menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang-ruang tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kolonial Belanda memengaruhi pemanfaatan ruang publik di kota Bogor, serta bagaimana perubahan fungsi ruang publik seiring dengan peralihan kekuasaan dan dinamika sosial masyarakat lokal. Misalnya, seperti Kebun Raya Bogor yang awalnya difungsikan untuk penelitian ilmiah dan konservasi, kini menjadi salah satu destinasi wisata dan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mendeskripsikan bagaimana ruang publik di Kota Bogor pada periode kolonial bukan hanya sebagai hasil pembangunan fisik, tetapi untuk mengetahui fungsi dan makna ruang publik pada masa kolonial dan mengidentifikasi bagaimana bangunan yang awalnya dirancang untuk kepentingan kolonial dapat berubah fungsi menjadi fasilitas publik yang lebih inklusif setelah kemerdekaan. Pemilihan rentang waktu 1908–1950 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan historis yang signifikan, karena mencakup masa transisi penting dalam sejarah Kota Bogor.

Tahun 1908 dipilih sebagai titik awal karena bertepatan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi pemerintah kolonial Belanda melalui *Decentralisatie Wet* (Undang-Undang Desentralisasi) yang mulai diimplementasikan secara nyata di berbagai kota, termasuk Bogor. Melalui kebijakan ini, kota-kota kolonial memperoleh status *gemeente* (kotapraja), yang memberikan otonomi administratif dan membuka peluang pengembangan ruang publik secara lebih sistematis sesuai kepentingan kolonial. Buitenzorg (Bogor) secara resmi menjadi *gemeente* pada tahun 1905 dan implementasi pengelolaan kotanya mulai berjalan aktif sejak 1908. Sementara itu, tahun 1950 dipilih sebagai batas akhir karena menandai masa awal konsolidasi pemerintahan Republik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949.

Pada masa ini, terjadi transformasi signifikan dalam pemanfaatan ruang publik, dengan fungsi bangunan dan kawasan yang sebelumnya dikuasai atau dibatasi untuk kepentingan kolonial mulai diadaptasi oleh masyarakat dan pemerintah nasional untuk kepentingan sosial, budaya, dan politik yang lebih

inklusif. Penelitian ini menelusuri aspek sosial dan politik yang memengaruhi perubahan fungsi tersebut, sebuah perspektif yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek fisik pembangunan saja.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemanfaatan ruang publik di kota Bogor pada tahun 1908-1950?”. Rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang ruang publik di Kota Bogor tahun 1908-1950?
2. Bagaimana pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor 1908-1950?
3. Bagaimana perubahan fungsi ruang publik di Kota Bogor tahun 1942-1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pemanfaatan bangunan publik di kota Bogor dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang ruang publik di Kota Bogor tahun 1908-1950.
2. Untuk mengidentifikasikan pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor tahun 1908-1950.
3. Untuk menganalisis perubahan fungsi ruang publik di Kota Bogor tahun 1942-1950.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat khususnya masyarakat kota Bogor mengenai pemanfaatan bangunan publik pada masa kolonial.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan bangunan publik di kota Bogor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan Lembaga terkait dalam merancang kebijakan pada pemanfaatan bangunan publik di kota Bogor.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berfokus pada pengaruh kebijakan kolonial terhadap pemanfaatan dan perubahan fungsi bangunan publik.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

Kajian teori menjadi landasan penting dalam melaksanakan penelitian untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah disampaikan dalam rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, kajian teoritis berperan untuk memperdalam serta memfokuskan topik yang akan dikaji. Beberapa kajian teoritis yang mendasari penelitian ini membantu memberikan arah yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai.

1.5.1.1 Teori Ruang Publik

Jürgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena, setiap individu-individu berkumpul untuk membahas isu-isu publik dengan tujuan membentuk opini umum secara rasional. Konsep ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan negara, memungkinkan kontrol dan evaluasi kekuasaan negara melalui diskusi kritis yang didasarkan pada rasionalitas. Dalam bukunya *The Structural Transformation of Public Sphere*, Habermas menjelaskan ruang publik borjuis yang muncul di Eropa abad ke-17 dan 18. Ruang ini biasanya berbentuk salon, klub, atau warung kopi yang digunakan oleh kelas borjuis untuk berdiskusi mengenai isu sosial, ekonomi, dan politik secara bebas dari hierarki status sosial.⁵ Habermas menyoroti tiga prinsip ideal dari ruang publik, yaitu kesetaraan, artinya status sosial tidak relevan dan argumen terbaik menjadi penentu; inklusivitas, yang memungkinkan semua orang berpartisipasi selama menggunakan rasionalitas; dan

⁵ Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 16, No. 2 (November 2012), hlm. 172.

diskursus rasional, yang berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Habermas mengakui bahwa ideal-ideal ruang publik seringkali sulit diwujudkan sepenuhnya akibat dominasi kekuasaan negara, ketidaksetaraan ekonomi, dan distorsi komunikasi. Meski mendapat kritik atas pandangannya yang awalnya dianggap homogen, Habermas kemudian mengakui pluralitas ruang publik dalam masyarakat modern sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas dan keberagaman komunitas. Dengan demikian, konsep ruang publik Habermas tetap relevan sebagai landasan untuk memahami bagaimana masyarakat dapat menjamin legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan melalui diskursus rasional.

Terdapat dua konsep ruang publik, yaitu ruang publik terbuka dan tertutup memiliki perbedaan mendasar dalam karakteristik, fungsi, dan aksesibilitasnya. Ruang publik terbuka adalah ruang yang tidak memiliki pembatas fisik seperti dinding atau atap, yang biasanya berada di luar ruangan dan bebas diakses oleh masyarakat. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor (1817), Alun-alun Kota Bogor, dan Taman Prinsen Juliana (1900–1916). Ruang-ruang ini berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, dan kegiatan budaya. Selain itu, ruang terbuka ini seringkali menjadi lokasi penyelenggaraan acara-acara besar, seperti upacara atau demonstrasi. Keunggulan ruang terbuka adalah kemampuannya menampung banyak orang tanpa batasan kapasitas yang ketat, namun penggunaannya dapat terganggu oleh cuaca buruk atau sulitnya pengawasan.

Ruang publik tertutup adalah ruang yang berada dalam bangunan dengan batasan fisik berupa dinding, atap, dan pintu masuk. Ruang ini biasanya memiliki akses yang lebih terbatas, seperti jam operasional atau tiket masuk, namun menyediakan kenyamanan dan fasilitas tertentu. Contoh ruang publik tertutup di Bogor meliputi Balai Kota Bogor (1868), yang awalnya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial, Stasiun Kereta Api Bogor (1881), sebagai fasilitas transportasi, dan Museum Zoologi Bogor, yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan penelitian. Ruang publik tertutup memberikan perlindungan dari cuaca serta lebih mudah diawasi, meskipun kapasitasnya terbatas oleh luas bangunan.

Secara keseluruhan, baik ruang publik terbuka maupun tertutup memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ruang terbuka seperti taman dan alun-alun menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi, sedangkan ruang tertutup seperti museum dan balai kota mendukung aktivitas administratif, pendidikan, dan ekonomi. Kombinasi dari keduanya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kota yang inklusif, sebagaimana terlihat di Kota Bogor sejak masa kolonial hingga saat ini.

Peneliti menggunakan teori tersebut untuk membantu memahami bagaimana bangunan publik di kota Bogor pada masa kolonial Belanda bukan hanya berfungsi sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai produk sosial, kekuasaan dan kepentingan politik. Teori ini memungkinkan untuk menelusuri lebih dalam mengenai bagaimana ruang-ruang ini berperan dalam dinamika sosial masyarakat kota Bogor, baik sebagai alat kontrol politik maupun sebagai tempat interaksi sosial mengalami perubahan waktu ke waktu.

1.5.1.2 Teori Penggunaan Ruang

Konsep "penggunaan ruang" menganalisis bagaimana ruang digunakan, diatur, dan dimanfaatkan oleh individu dan kelompok dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Teori ini melibatkan analisis berbagai elemen, seperti distribusi ruang, aksesibilitas, pengendalian, dan interaksi yang terjadi di dalam ruang. Teori penggunaan ruang diuraikan oleh Edward Relph dalam buku berjudul *Place and Placelessness*, yang memperhatikan bahwa pemahaman ruang adalah penting karena hubungannya dengan pengalaman manusia.⁶ Edward Relph menguraikan beberapa konsep penting terkait ruang dalam bukunya. Ia membedakan antara ruang eksistensial dan pragmatik.

⁶ Seamon, D., & Sowers, J. (2008). *Place and Placelessness*, Edward Relph. *Key texts in human geography*, 43-51.

Ruang eksistensial mencakup aspek budaya dan sosial yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari seseorang, sedangkan ruang pragmatik lebih fokus pada praktik sehari-hari individu atau kelompok. Relph juga memperkenalkan konsep kontinum pengalaman ruang yang mencakup dari pengalaman langsung yang sering dialami secara naluriah dan jasmaniah hingga pemikiran abstrak tentang ruang yang lebih konseptual. Selain itu, teori keterikatan (*insideness*) dan keterasingan (*outsideness*) menjelaskan seberapa dekat seseorang merasa dengan suatu tempat; jika seseorang merasa "di dalam" suatu tempat, mereka merasa nyaman dan terhubung secara emosional, sedangkan jika merasa "di luar," mereka merasa terasing. Relph juga menggunakan istilah "placelessness" untuk menggambarkan kehilangan identitas unik suatu tempat akibat homogenisasi ruang yang sering terjadi ketika ruang atau bangunan dirancang tanpa mempertimbangkan konteks lokal, menyebabkan orang merasa terputus dari makna budaya dan emosional yang biasanya melekat pada tempat tersebut.

Jadi penggunaan ruang memiliki makna yang lebih dari sekadar lokasi fisik, tetapi mencakup dimensi sosial, emosional dan kultural yang penting dalam pengalaman manusia. Peneliti menggunakan teori ini, karena dapat membantu untuk menganalisis apakah bangunan publik di Bogor pada periode tahun 1908-1950 dibangun sesuai identitas lokal atau cenderung homogen dan kehilangan ciri khasnya karena pengaruh desain dari kebijakan kolonial. Kemudian, menganalisis mengenai bagaimana bangunan publik ini berperan dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat serta memiliki fungsi-fungsi sosial, politik atau ekonomi yang digunakan oleh pemerintah kolonial.

1.5.1.3 Teori Transformasi Ruang

Tulisan *Colonial Urban Development* karya Anthony D. King, transformasi ruang didefinisikan sebagai proses perubahan fisik dan sosial dari ruang perkotaan yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan sosial, politik, dan budaya.⁷ Proses ini terutama terjadi dalam konteks kolonial, yang berarti kekuasaan kolonial mendominasi perencanaan dan pengaturan ruang perkotaan sesuai dengan

⁷ Anthony D. King, *Colonial Urban Development: Culture, Social Power, and Environment* (London: Routledge, 1976), 16.

kebutuhan dan kepentingan mereka. Transformasi ruang tidak hanya mencakup perubahan fisik bangunan dan infrastruktur, tetapi juga perubahan dalam cara ruang tersebut digunakan dan diartikan oleh masyarakat yang berbeda.

King menjelaskan bahwa ruang perkotaan kolonial merupakan produk dari sistem kekuasaan yang mengatur dan memisahkan kelompok etnis dan sosial di dalam kota. Proses transformasi ini melibatkan penataan ruang yang diorganisir berdasarkan hierarki sosial yang tercermin dalam pemanfaatan dan pengaturan ruang publik serta perumahan, yang sering kali dibedakan antara penduduk kolonial dan penduduk pribumi. Teori transformasi ruang dalam pembangunan perkotaan kolonial mencakup beberapa konsep utama. Pertama, transformasi ruang di kota kolonial sangat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan antara masyarakat kolonial dan penduduk asli, ruang publik diatur oleh kebijakan kolonial yang mencerminkan struktur kekuasaan dan dominasi. Kedua, variabel budaya memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan perkotaan, dengan institusi sosial seperti pemerintahan, militer, agama, dan ekonomi sangat menentukan bagaimana ruang kota direncanakan dan diorganisir. Ketiga, salah satu karakteristik penting dari kota kolonial adalah segregasi ruang berdasarkan etnis, dengan sebagian kota dihuni oleh penduduk asli dan bagian lainnya diperuntukkan bagi masyarakat kolonial. Terakhir, proses urbanisasi kolonial menciptakan kota yang berbeda dengan kota pra-industri atau kota industri Barat, karena kota kolonial dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan kolonial yang berbeda baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Manuel Castells dalam buku *The City and the Grassroots*, menjelaskan bahwa transformasi ruang terjadi melalui interaksi antara kekuatan sosial dan gerakan sosial dalam konteks urban. Ruang perkotaan tidak hanya merupakan entitas fisik, tetapi juga konstruksi sosial yang mencerminkan dinamika kekuasaan, identitas dan konflik.⁸ Transformasi ruang terjadi ketika kelompok-kelompok sosial terlibat dalam perjuangan untuk mengendalikan, memodifikasi dan memberi makna baru pada ruang-ruang kota, mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya.

⁸ Manuel Castells, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements* (London: Edward Arnold, 1983), 10.

Dapat disimpulkan bahwa transformasi ruang merupakan proses perubahan fisik dan sosial dari suatu ruang perkotaan yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perubahan sosial ini diakibatkan oleh urbanisasi dan modernisasi yang membawa dampak positif seperti interaksi lintas budaya, namun juga negatif dengan ketimpangan akses yang memicu ketegangan, dengan respon warga Bogor bervariasi elit lokal menyambut fasilitas baru, sementara rakyat kecil sering merasa terpinggirkan.

Dalam konteks kolonial, transformasi ruang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial yang mendominasi perencanaan kota untuk kepentingan mereka, menciptakan segregasi sosial dan etnis. Di sisi lain, transformasi ruang juga melibatkan perjuangan dan interaksi kelompok sosial untuk mengendalikan, memodifikasi, dan memberikan makna baru pada ruang tersebut. Transformasi ini tidak hanya merujuk pada perubahan fisik, tetapi juga pada dinamika sosial, identitas, dan kekuasaan yang tercermin dalam penggunaan dan pengaturan ruang.

Peneliti menggunakan teori ini untuk membantu menjelaskan perubahan fungsi, bentuk, dan penggunaan bangunan publik dari masa ke masa. Sebagai contoh Kebun Raya Bogor, stasiun kereta api dan bangunan lainnya. Pada awalnya, bangunan tersebut dibangun untuk keperluan administrative atau sebagai simbol kekuasaan kolonial. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu bangunan ini mulai bisa diakses dan dimanfaatkan oleh pribumi untuk keperluan sosial dan aspek lainnya.

1.5.2 Kajian Pustaka

Pertanyaan penelitian pertama tentang bagaimana kebijakan pemerintah tentang bangunan publik di Kota Bogor tahun 1817-1908, menggunakan kajian pustaka yang berasal dari jurnal yang berjudul Pengaruh Kolonialisasi Belanda di Kawasan Pusat Kota Pulau Jawa: Sebuah Kajian Literatur, merupakan jurnal nature National academic journal of architecture Vol. 7, No 1 Universitas Gajah Mada. Dalam penelitian ini mendeskripsikan kebijakan kolonial Belanda membawa modernisasi dalam tata kota pulau Jawa, termasuk di kota Bogor yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan fungsinya. Dalam penelitian ini dicontohkan pada pengembangan jalur kereta api, kantor administrasi dan fasilitas umum lainnya

untuk mendukung kepentingan ekonomi dan administrasi kolonial. Pemerintah kolonial juga memanfaatkan tanah-tanah untuk kepentingan perkebunan dan pengembangan infrastruktur untuk mempermudah dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam.

Pertanyaan penelitian kedua tentang bagaimana fungsi bangunan publik di kota Bogor pada tahun 1817-1908, menggunakan kajian pustaka yang berasal dari *e-journal* yang berjudul Pengaruh Jalur Kereta Api Batavia-Buitenzorg Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Batavia Tahun 1875-1913, merupakan *e-journal* Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam *e-journal* ini mendeskripsikan dampak pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg oleh pemerintah kolonial Belanda tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi sistem transportasi tetapi juga memungkinkan akses ke daerah pedalaman, seperti Buitenzorg (Bogor), yang memiliki pusat perdagangan di Batavia. Dengan pembangunan ini, mobilitas penduduk meningkat dan ekonomi lokal berkembang, terutama di sekitar stasiun kereta, dan setiap orang memiliki kesempatan baru untuk berdagang atau bekerja sebagai buruh angkut. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur kereta api mempercepat modernisasi dan urbanisasi, yang berdampak pada pemanfaatan ruang publik di daerah tersebut. Selain itu, upaya pemerintah kolonial untuk mempermudah transportasi barang ekspor dari daerah pedalaman ke pelabuhan terkait dengan kebijakan pembangunan jalur kereta api. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan infrastruktur kolonial mempengaruhi fungsi dan penggunaan Bangunan publik Bogor pada masa itu.

Pertanyaan penelitian ketiga tentang bagaimana perubahan fungsi bangunan publik di kota Bogor tahun 1817-1908, menggunakan kajian pustaka yang berasal dari jurnal *Lensa Budaya* Vol. 12 No 2 yang berjudul Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis. Pada penelitian ini mendeskripsikan bahwa penerapan undang-undang desentralisasi dan kebijakan ekonomi liberal membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola kota. Pada masa itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sistem transportasi menjadi simbol kekuasaan dan dominasi kolonial. Namun terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, seperti peningkatan mobilitas sosial dan urbanisasi. Fungsi dari

bangunan infrastruktur itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam berbagai aspek, contohnya aspek ekonomi, administrative dan aspke sosial yang lebih luas.

1.5.3 Hasil Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merujuk pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk tugas akhir, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan saat ini. Penulis telah menemukan tiga penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang peneliti ambil merupakan tugas akhir atau skripsi yang ditulis oleh Rucitra Deasy Fadila mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Perkembangan Tata Kota Bogor dari Abad ke-18 Hingga Abad ke-20”. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan tata kota Bogor pada abad ke-18 yang menjadi titik awal penyebaran bangunan-bangunan kolonial di sekitarnya. Pemerintah kolonial memainkan peran penting dalam perencanaan tata ruang kota, membangun berbagai infrastruktur yang mendukung administrasi dan penelitian, terutama di bidang botani dan pertanian, seperti Kebun Raya Bogor. Kota Bogor juga mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya bangunan-bangunan kolonial yang masih bertahan hingga saat ini, seperti gedung pemerintahan, militer, dan penelitian. Bangunan-bangunan ini diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dan menjadi salah satu pendorong utama dinamika tata kota Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial dan kebutuhan administrasi kolonial sangat mempengaruhi pembentukan tata ruang kota, dengan dampak yang masih terlihat hingga sekarang. Penelitian terdahulu mencakup semua elemen tata kota, seperti bangunan pemerintahan, infrastruktur militer, fasilitas penelitian, dan fungsi administrasi. Fokus utamanya adalah pada bagaimana kolonial Belanda membentuk tata ruang kota secara menyeluruh. Sedangkan penelitian ini terbatas pada ruang-ruang publik tertentu dan bagaimana ruang tersebut dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat dalam konteks sosial dan politik pada masa itu.

Penelitian terdahulu dalam bentuk artikel ilmiah yang ditulis oleh Aria Dirgantara Putra, Muhammad Azwir, Vera Octaviany dan Rasty Nilamsuci dengan

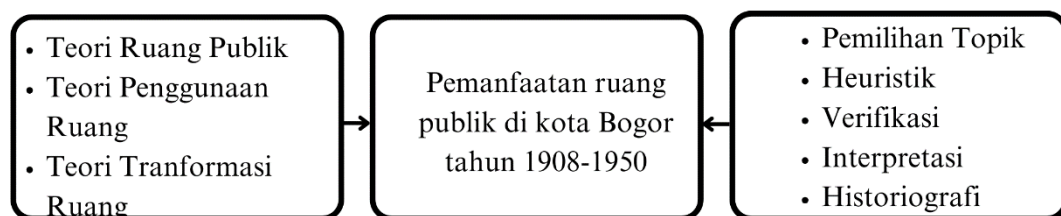
judul Kajian Transformasi Bentuk dan Fungsi Alun-alun Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Reka Karsa Vol. 3, Maret 2015. Penelitian ini mengkaji perubahan bentuk dan fungsi Alun-alun Bandung sebagai ruang terbuka publik dari tahun 1800 hingga 2014. Tujuan penelitian adalah untuk memahami perubahan dalam elemen-elemen pembentuk ruang terbuka, termasuk taman, jalur hijau kota, lapangan, perabot taman, dan jalur pedestrian, serta tipologi ruang terbuka dan fungsi administratif serta sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alun-alun Bandung mengalami tujuh kali perubahan bentuk dan fungsi sepanjang periode tersebut, menggambarkan dinamika dan evolusi ruang terbuka publik yang signifikan. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana masyarakat menggunakan ruang publik seperti taman dan alun-alun dalam konteks sosial dan politik selama periode tertentu. Penelitian terdahulu menyoroti evolusi jangka panjang dengan fokus fisik-ruang, sementara penelitian ini membahas dimensi sosial dan politik pada ruang publik dalam kerangka waktu spesifik.

Penelitian terdahulu dalam bentuk artikel ilmiah yang ditulis oleh Deni Sutrisna, dengan judul Kebun Raya Bogor dan Fasilitasnya, Sejarah dan Fungsi di Masa Lalu dan Kini : Kebun Raya Bogor *And Its Facilities, History And Functions In The Past And Present*. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Panalungitik Vol. 3 (2), Desember 2020. Dalam artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa Kebun Raya Bogor telah memainkan peran penting dalam pembangunan Kota Bogor. Kebun Raya Bogor pertama kali didirikan oleh Caspar Georg Karl Reinwardt pada tahun 1817 dan dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal dan pusat penelitian botani bagi para pejabat kolonial. Penelitian tentang Kebun Raya Bogor berfokus pada sejarah dan fungsi Kebun Raya sebagai pusat penelitian botani, konservasi lingkungan, dan destinasi wisata sejak didirikan pada tahun 1817 hingga saat ini, dengan pendekatan historis dan ekologis. Sementara itu, penelitian tentang ruang publik di Kota Bogor menekankan pada penggunaan ruang publik seperti taman dan alun-alun oleh masyarakat selama periode 1908-1950, menggunakan pendekatan sosial-historis untuk memahami dinamika sosial di ruang publik. Penelitian

terdahulu lebih terfokus pada peran Kebun Raya dalam konteks penelitian dan konservasi, sedangkan penelitian ini menyoroti dimensi sosial dan politik penggunaan ruang publik pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai alur pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga terbentuk kerangka berpikir yang jelas untuk diterapkan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan bangunan publik di Kota Bogor selama periode 1908-1950 melalui pendekatan teori yang telah digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti akan mendeskripsikan pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor pada tahun 1908-1950, dimulai dengan meneliti kebijakan pemerintah kolonial terkait pembangunan ruang publik di Kota Bogor pada periode tersebut. Selanjutnya, penulis akan membahas fungsi ruang publik di Kota Bogor pada tahun 1908-1950, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi bangunan-bangunan publik tersebut selama periode yang sama.

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian sejarah adalah serangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Penelitian sejarah menggunakan berbagai metode, termasuk pengumpulan data, kritik sumber, analisis, dan penulisan narasi sejarah.⁹ Tujuan dari metode ini adalah tidak hanya menjawab

⁹ Kuntowijoyo, D. R. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana. Yogyakarta

pertanyaan penelitian, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, arti, dan pengaruh peristiwa yang diteliti.

1.6.1 Pemilihan Topik

Kuntowijoyo menyebutkan bahwa dalam penelitian sejarah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih topik. Dalam pemilihan topik penelitian sejarah, harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti kedekatan emosional untuk menciptakan motivasi, dan kedekatan intelektual untuk membantu peneliti bekerja karena sesuai minat dan kemampuan.¹⁰ Kemudian, setelah menemukan topik, yaitu membuat rencana penelitian yang mencakup permasalahan, historiografi, sumber sejarah dan garis besar penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik mengenai pemanfaatan ruang publik di kota Bogor tahun 1908-1950, karena belum banyak penelitian yang fokus pada pemanfaatan spesifik mengenai bangunan publik, khususnya di kota Bogor.

1.6.2 Heuristik

Heuristik yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor pada tahun 1908-1950. Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah, baik yang tertulis maupun lisan, relevan dengan peristiwa atau masalah yang diteliti.

Dokumen tertulis seperti arsip kolonial Belanda, surat kabar sezaman, laporan tahunan pemerintah Hindia Belanda, dan buku sejarah tentang kebijakan pembangunan ruang publik di kota-kota kolonial adalah sumber yang akan dikumpulkan. Adapun sumber yang sudah peneliti kumpulkan, sebagai berikut:

1. S' Lands Plantentuin, Buitenzorg 1817-1992: Kebun Raya Indonesia Bogor, karya Theo F. Rijnberg dan Enschede.
2. Geschiedenis van Buitenzorg Karya Faes tahun 1902
3. Bataviaasch Newsblaad tahun 1916
4. Jaarverslag Van 's Lands Plantentuin.
5. Verslag van bibliotheca Bogoriensis, penerbit S.n.
6. Spoorwegstations op Java, karya Michiel van Ballegoijen de Jong

¹⁰ *Ibid.* hlm 70

7. Kota Bogor dan perkembangannya, penerbitan Buana Baru.
8. Kota Bogor: studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20 / Mumuh M Zakaria.
9. Bogor Peninggalan Sejarah dari masa ke masa, karya Neneng Hendriyani.
10. Sejarah Bogor bagian 1, oleh Saleh Danasasmita.

Peneliti juga akan menggunakan arsip foto, peta kota, dan sketsa bangunan publik kolonial. Data fisik tentang bangunan kolonial Bogor, seperti Museum Zoologi atau Stasiun Kereta Api Bogor juga akan digunakan untuk memperkaya kajian. Sumber-sumber ini akan diperoleh melalui penelitian pustaka di perpustakaan lokal, arsip nasional, serta sumber-sumber digital yang tersedia.

1.6.3 Verifikasi

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi, yang dimaksudkan untuk memverifikasi keaslian dan kredibilitas sumber tersebut. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber sejarah yang telah dikumpulkan, terdiri dari kritik ekstern untuk memeriksa otentisitas dan kritik intern untuk menilai kredibilitas isi sumber.

Kritik Eksternal bertujuan untuk mengevaluasi validitas (otentisitas) sumber yang digunakan. Peneliti harus memastikan bahwa sumber atau dokumen yang mereka peroleh benar-benar asli dan tidak diubah atau dipalsukan. Dalam kasus ini, peneliti akan melihat sifat fisik dari sumber sejarah, seperti jenis kertas, tinta, gaya tulisan, atau bahkan jenis huruf yang digunakan, apakah sesuai dengan periode waktu yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis material fisik sumber tertulis, seperti arsip, dokumen, tinta dan Teknik penulisan, untuk menentukan keaslian material. Salah satu sumbernya adalah buku *Geschiedenis van Buitenzorg* karya Faes tahun 1902. Kemudian, memastikan tanggal dan lokasi yg dicantukan pada dokumen sesuai dengan pembangunan yang terjadi di Bogor tahun 1908-1950.

Kemudian setelah memastikan keaslian dokumen dengan kritik eksternal, melakukan kritik internal. Kritik internal memeriksa konten dokumen, menilai apakah informasi yang disajikan benar dan relevan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau isi dokumen atau arsip mengenai ruang publik

untuk memahami pemanfaatan ruang publik, kemudian mengevaluasi apakah informasi sumber tersebut cukup mendalam dan konsisten mengenai informasi terkait sejarah pemanfaatan bangunan publik di kota Bogor. Contohnya pada buku *Geschiedenis van Buitenzorg dan Bataviaasch Newsblaad* tahun 1916.

1.6.4 Interpretasi

Setelah melalui tahap kritik sumber, dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi dengan tujuan untuk merangkai hubungan antar fakta tersebut dalam sebuah narasi. Pada tahap ini, peneliti akan menelaah bagaimana kebijakan kolonial Belanda memengaruhi penggunaan ruang publik di Kota Bogor dari tahun 1908-1950. Analisis dokumen dan arsip yang telah dikumpulkan akan memungkinkan uraian detail sejarah secara menyeluruh. Selain itu, peneliti akan menggabungkan informasi yang berbeda untuk sampai pada kesimpulan mengenai fungsi ruang publik, terlepas dari apakah ruang tersebut digunakan untuk tujuan sosial, ekonomi, atau politik.

Interpretasi tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang relevan pada saat itu. Dalam proses ini, dua pendekatan digunakan: pendekatan analitis, yaitu peneliti mempelajari hubungan antar komponen dengan menguraikan dan mengevaluasi informasi satu per satu, dan pendekatan sintesis, di mana berbagai informasi dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih luas.

1.6.5 Historiografi

Historiografi adalah tahap penulisan sejarah. Hasil interpretasi disusun menjadi narasi yang sistematis dan runtut, sesuai dengan perkembangan kronologis peristiwa. Hal ini penting karena historiografi tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi dalam sejarah, tetapi juga bagaimana sejarah ditulis, ditafsirkan, dan disajikan kepada publik.

Pada tahap historiografi ini, diharapkan peneliti mampu menyajikan penulisan ulang tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor pada tahun 1908-1950. Peneliti juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait

bagaimana bangunan publik dimanfaatkan pada masa itu, serta menarik kesimpulan mengenai pemanfaatan bangunan publik di masa kini dan masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka kerja atau struktur yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisir pembahasan dalam penelitian. Sistematika ini membantu peneliti menyampaikan informasi secara sistematis dan logis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami alur pemikiran dan analisis yang disajikan. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Bogor tahun 1908-1950” ini memiliki beberapa Bab dengan susunan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan mengenai latar belakang pengambilan topik terkait pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor tahun 1908-1950, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoritis, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang sejarah perkembangan kota Bogor pada abad ke-19 sebagai awalan dari berkembangnya ruang publik di kota Bogor tahun 1908-1950. Bagaimana kondisi sosial kota Bogor pada masa itu.

Bab tiga berisi tentang pembangunan dan pemanfaatan ruang publik di kota Bogor tahun 1908-1950 dan menjelaskan berbagai ruang publik yang termasuk tempat sosial dan politik pada masa kolonial, yang terdiri dari S’Lands Plantentuin (Kebun Raya Bogor), Bilbiliotheca Bogoriensis (Perpustakaan Pusat), Societiet (Balai kota bogor), Stasiun kereta api, Kedung Karesidenan, Taman Kencana, Taman Wilhelmina (Alun-alun).

Bab empat berisi tentang perubahan fungsi ruang publik di kota Bogor tahun 1908-1950. Ini mencakup pengaruh kebijakan kolonial, dinamika sosial, serta interaksi antara masyarakat kolonial dan pribumi yang mengubah cara ruang publik digunakan dan diakses.

Bab lima berisi penutup dan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis mengenai pemanfaatan ruang publik di Kota Bogor tahun 1908-1950. Di bagian ini juga akan disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi untuk pelestarian ruang publik di Kota Bogor.